

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baharuddin Lopa. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Della Luysky Selian. 2018. *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi Catatan Hak Asasi Manusia*. Volume 2/Nomor. 2.
- Ifdal Kasim. 2001. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Had Saleem Furuqui, 1998. *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar ilmu hukum tatanegara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Juhdariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johni Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Husen Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun Ismail, 2019. *Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Teori Negara Hukum*. Volume 2/Nomor 1.
- M. Nur Rasais, 2003. *Hukum Acara Perdata*. cet.III . Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Muhamad Iqbal Susanto. 2019. "*Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.*" Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cet: I. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Nimatul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindopersada. Jakarta.
- Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan –Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*. ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka. 1977. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumnus
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. Ke-13. Jakarta: Kencana.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Serlika Aprita. Yohani Hasyim. 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1998. *Hukum acara perdata di lingkungan peradilan*, cet. I. Jakarta: Pustaka Kartini.
- R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 13. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satria arinanto, 2008. *Dimensi-Dimensi Hak asasi manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Alya Rahmadani. Monika Lisa Paramita. dkk, 2024. *Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Of Social Contemplativa, Volume 2 .Nomor 1.
- Arju Sethiawanza. 2023.*Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Volume 1. Nomor 1.
- Arienda Addis Prasetyo. 2022. *Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digita*. Jurnal Filsafat Indonesia. Vol 5 Nomor 3. Perpustakaan STIKES Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bima Guntara and Ayni Suwarni Herry. 2022. *“Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,”* Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) Volume 4. nomor 6.
- Cokorde. Istri Dian Laksmi Dewi. 2021. *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, jurnal Yustitia, Volume 15. Nomor, 1.
- Dinda Heidiyuan Agustanita dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2022. *Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Suara Hukum. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Trunojo. Madura. Indonesia.
- Esa Lupita Sari, Lista Widyastut 2021. *Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia*. Majalah Hukum Nasional. Volume 51 Nomor 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

- Irvan Maulana dan Mario Agusta. 2021. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Volume 2. Nomor 2.
- Febrianasari. Sinta Amelia dan Waluyo, 2022, *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2.
- Kristian Megahputra Warong. 2020. *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*. Lex Administratum, Volume VIII. Nomor 5. Edisi Khusus.
- Kusuma. Ersu. 2023. *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sanskara Hukum Dan HAM. Volume 1. Nomor 3.
- Kirana Apsaridan Komang Pradnyana Sudibya. 2021. *Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham*. Jurnal Kertha Negara. Vol. 9 No. 10. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mayolaika. Shelma. dkk, 2021, *Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 5. nomor 2
- Marwandianto dan Nasution. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM.
- Muhammad Wahyu Andriansyah. Sekaring Ayumeida Kushadi. 2024. *Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Gorontalo Law Review. Volume 7 Nomor 2. Faculty of law Gorontalo University.
- Nur Indah Fitriani. Revania Nazalla, Razaqa Azka. dan Teguh Suryo Adi W. 2021. *Kebebasan Berpendapat di Era Media Sosial: Tantangan dan Solusi Hak Asasi Manusia* Jurnal

Pengembangan Pemikiran Ilmu Pengetahuan, Volume 2.
Nomor. 1

Pratama. M. I. Abdul Rahman, & Bachmid, F. 2022. *Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2.

Ratih Frayunita Sari. 2019. *Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif*. Volume 23, Nomor. 1.

Rezky Setyawan Amir. *et al.* 2021. *Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial*, Jurnal of lex Generalis (JLS). Volume 2 Nomor 3. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia.

Sigit, B. 2022. *"Media Sosial dan Kebebasan Berpendapat: Tinjauan terhadap Dampak UU ITE di Indonesia"*. Jurnal Kebebasan Berpendapat. Volume 10. Nomor 2.

Wiranata. Moh.Khamim. Imam Asmarudin. 2023. *Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia*, Pancasakti Law journal. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Pancasakti Tegal.

C. Internet

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> diakses pada tanggal 21 Juli, 2025.

<https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/> di akses pada tanggal 15 Oktober 2025.

https://goodstats.id/article/safenet-banyak-pelapor-pelanggaran-uu-ite-menggunakan-alasan-pencemaran-nama-baik-UUqbH?utm_source=chatgpt.com di akses pada tanggal 19 mei 2025.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-73170> di akses pada tanggal 19 mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-berpendapat-melalui-media-sosial-lt65ea9aa75887d/?page=2> pada tanggal 12 April 2025 Pukul 23.48 Wita.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/> di akses pada tanggal 13 Oktober 2025.

Lainya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28F.

Data rekap tindak pidana pencemaran nama baik (ITE) pada Subdit V Ditreskrimsus polda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2025.

Wawancara Bersama Febrian Anggara Putra Pratama selaku Bintara Anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan wawancara pada tanggal 25 September 2025.

Wawancara Bersama Hasmin Sulaiman, selaku kadiv hukum PBHI Sulawesi Selatan wawancara pada tanggal 23 September 2025.

Wawancara Bersama Ipda Ahmad Fatir, selaku Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2025.

Wawancara Bersama Syamsul Rijal, selaku kepala divisi program dan advokasi PBHI Sulawesi Selatan wawancara pada tanggal 23 September 2025.

Wawancara Bersama Hasmin Sulaiman selaku kadiv Humas PBHI Sulawesi Selatan wawancara pada tanggal 23 September 2025.

Wawancara Bersama Ahmad Fatir, selaku Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan wawancara pada tanggal 25 September 2025.